

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin dan Asikin, Zainal, 2003, *Pengantar Metode Penulisan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Anggriani, Jum, 2012, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Anwar, Yesmil, dan Adang, 2010, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung
- Arief, Nawawi, Barda, 2016, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta
- Asshidique, Jimly, 2006, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Konstitusi Press, Jakarta
- _____, 2009, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Atmasasmita, Romli, 2002, *Korupsi, Good Governance & Komisi Anti Korupsi di Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta
- Black, Campbell, Henry, edited by Garner, A. Bryant, 2004, *Black's Law Dictionary*, Thomson West Eight Edition, St. Paul Minnesota
- Clarke, Michael, 1990, *Business Crimes its Nature and Control*, Polity Press, Cambridge
- Fajar, Mukti dan Achmad, Yulianto, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Friedrich, O, David, 1996, *Trusted Criminals: White Collar Crime in Contemporary Society*, Wadsworth, Belmont
- Gunarto, Priyo, Marcus, 2007, *Perkembangan Unsur Delik Korupsi*, Marginal Press, Yogyakarta
- H R, Ridwan, 2007, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- _____, 2014, *Diskresi dan Tanggung Jawab Pemerintah*, FH UII Press, Yogyakarta

- H.S, Salim dan Nurbani, Setiana, Erlies, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajawali Press, Jakarta
- Hadjar, Fickar, A, 2003, *Pokok-pokok Pikiran dan Rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi*, KRHN dan Kemitraan, Jakarta
- Hadjon, M, Philipus, 1993, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya
- _____, 1997, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Harahap, Yahya, M, 2009, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Hiariej, O.S, Eddy, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta
- Hikmawati, Puteri, 2015, *Penyadapan dalam Hukum di Indonesia: Perspektif Ius Constitutum dan Ius Constituendum*, P3DI DPR RI, Azza Grafika, Jakarta
- Husin, Kadri dan Husin, Rizki, Budi, 2016, *Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung
- Istanto, F. Sugeng, 2007, *Penelitian Hukum*, Ganda, Yogyakarta
- Kasim, Ihdhal, 2001, *Hak Sipil dan Hak Politik Esai-Esai Pilihan*, Elsam, Jakarta
- Kristian, 2013, *Sekelumit tentang Penyadapan dalam Hukum Positif di Indonesia*, Nuansa Aulia Bandung
- Laniers, M, Mark, dan Henry, Stuart, 2010, *Essential Criminology*, Edisi Ketiga, Westview Press, Boulder
- Lopa, Baharrudin, 2001, *Kejahatan Korupsi dan Penegakkan Hukum*, Kompas, Jakarta
- LPKIP, 2016, *Sisi Lain Akuntabilitas KPK dan Lembaga Pegiat Antikorupsi: Fakta dan Analisis*, Gramedia Pusataka Utama, Jakarta
- Manthovani, Reda, 2015, *Penyadapan vs. Privasi*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta
- Marzuki, Mahmud, Peter, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta

- Muhammad, Rusli, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta
- Muchsan, 1992, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah*, Liberty, Yogyakarta
- Newman, H, William, *Control: Past or Future* dalam Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah*, Liberty, Yogyakarta
- Puspa, Pramadya, Yan, 1977, *Kamus Hukum: Edisi Lenga Bahasa: Belanda-Indonesia-Inggris*, Aneka, Semarang
- Reksodiputro, Mardjono, 1993, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Melihat kepada Kejahatan dan Penegakkan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*, Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta
- Rukmini, Mien, 2014, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)*, PT Alumni, Bandung
- Siagian, P, Sondang, 2006, *Filsafat Administrasi*, Bumi Aksara, Jakarta
- Situmorang, M, Victor dan Juhir, Jusuf, 1998, *Aspek Pengawasan Melekat*, Rineka Cipta, Jakarta
- Supanto, 2016, *Perkembangan Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) dan Antisipasinya dengan Penal Policy*, FH Universitas Sebelas Maret, Yustisia, Surakarta
- Sujamto, 1986, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Ghalila Indonesia, Jakarta
- _____, 1987, *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Soekanto, Soerjono, 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta
- _____, 2015, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta
- _____, dan Mamudji, Sri, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta
- _____, dan Purbacaraka, Purwadi, 1993, *Perihal Kaedah Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Soemardjono, S W. Maria, 2014, *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Hukum*,
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

U.S Department of Justice, 1981, *Dictionary of Criminal Justice Data Terminolgy*,
Bureau of Justice Statistics, Washington D.C

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Independent Commission Against Corruption Ordinance 1974

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Tindak Pidana Narkotika

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tindak Pidana Terorisme

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi

C. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010 mengenai Pengujian UU
No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-IX/2011

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017

D. Artikel Jurnal

Achmad, Supardji, “Menyoal Dewan Pengawas KPK”, *Kolom Opini Media
Indonesia*, edisi Desember 2019

Adji, Seno, Indriyanto, “KPK: Dewan Pengawas dan Pro Justitia”, *Kolom Opini
Koran Sindo*, terbitan 3 Oktober 2019

Christianto, Hwian, “Tindakan Penyadapan Ditinjau Dari Perspektif Hukum
Pidana”, *Jurnal Hukum PRIORIS*. Vol. 5 No. 2 Tahun 2016

Fitria, Anita, Raissa, “Penyadapan Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Umum
Berdasarkan Hukum Acara Pidana”, *Jurnal Mimbar Keadilan*,
Agustus Tahun 2017

Merton, K, Robert, “Social Structures and Anomie”, *American Sociological Review*,
Vol. 3, No. 5 Tahun 1983

Naskah Akademik, “Rancangan Undang-Undang tentang Penyadapan”, *Pusat PUU
BK DPR RI*, Jakarta, Tahun 2018

Pambudhi, Danang, Hario, “Tinjauan Ketatanegaran Dewan Pengawas KPK”,
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, *Jurnal Pleads*, Tahun 2018

Pasaribu, Masinton, “KPK dan Revisi Undang-Undangnya”, *Smart FM dan
Pollmark*, Jakarta, 7 September 2019

Pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Istana Negara Jakarta, 09 Oktober
Tahun 2012

Setiawan, Arief, “Penyadapan dalam Perspektif Due Process of Law”, *Focus Group Discussion Fakultas Hukum UII*, 2014

Talaumbanua, Dalinama, “Restriktif Status Dewan Pengawas KPK”, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Nias Selatan, *Jurnal Education and Development* Vol. 8 Nomor 1 Edisi Februari Tahun 2020

Wulansari, Martiana, Eka, “Politik Hukum Perubahan Kedua UU KPK”, *Jurnal Rechts Vinding Online*, 4 April Tahun 2016

E. Karya Ilmiah

Resta, Prameswari, Widya, “Legalitas Operasi Tangkap Tangan Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Tahun 2019

Riyadi, Nugraha, Dimas, “Analisis Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Tahun 2020

F. Internet

“Abraham Samad Minta Pimpinan KPK Tak Loyo Tuntaskan Konflik Internal” dalam <https://www.liputan6.com/news/read/3956279/abraham-samad-minta-pimpinan-kpk-tak-loyo-tuntaskan-konflik-internal> diakses 25 Januari 2021

“Alexander Marwata Ungkap Konflik Internal Penyidik KPK” dalam <https://www.beritasatu.com/nasional/571883/alexander-marwata-ungkap-konflik-internal-penyidik-kpk> diakses 25 Januari 2021

Asshidiqie, Jimly, “Checks and Balances dan Judicial Review Dalam Legislasi di Indonesia” dalam <http://jimlyschool.com/read/analisis/333/checks-and-balances-dan-judicial-review-dalam-legislasi-di-indonesia> diakses 15 Juni 2020

“Dewan Pengawas” dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/dewan%20pengawas> diakses 28 Juli 2020

Kristiadi, Diki, “Konflik Internal KPK dan Upaya Membangun Kroni di Direktorat Penyidikan KPK” dalam <https://www.kompasiana.com/dikikristiadi/5cc97011cc52837f725e49c2/konflik-internal-kpk-dan-upaya-membangun-kroni-di-direktorat-penyidikan-kpk?page=all#sectionall> diakses 25 Januari 2021

“Pansus Pertanyakan Barang Sitaan KPK Yang Hilang” dalam <https://www.merdeka.com/peristiwa/pansus-pertanyakan-barang-sitaan-kpk-yang-hilang-bpk-turun-tangan.html> diakses 12 Agustus 2020

“Dewan Pengawas” dalam <https://www.airnavindonesia.co.id/cfind/source/files/informasi-publik/mechanisme%20penetapan%20dewan%20pengawas%20dan%20direksi.pdf>, Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI), diakses 28 Juli 2020

Fadika, Fawwaz, “Pengertian Deduktif dan Induktif” dalam <http://fawwazfadika.blogspot.com/2015/03/pengertian-deduktif-dan-induktif.html>, diakses 29 Agustus 2020

“Hak Angket Terhadap KPK dan Kepanikan Senayan” dalam <https://news.detik.com/kolom/d-3491384/hak-angket-terhadap-kpk-dan-kepanikan-senayan> diakses 8 Desember 2020

“KPK Sebaiknya Diatur Dalam UUD” dalam <https://nasional.kompas.com/read/2015/08/25/12375151/Menurut.Jimly.KPK.Sebaiknya.Diatur.Dalam.UUD.1945> diakses 12 Agustus 2020

“Izin Sadap Lemahkan KPK” dalam <https://nasional.kompas.com/read/2013/03/20/0823008/Izin.Sadap.Lemahkan.KPK?page=all> diakses 30 Desember 2020

Indriyanto Seno Adji dalam <https://www.suara.com/news/2015/10/13/130100/pimpinan-kpk-75-persen-kasus-yang-ditangani-kpk-hasil-penyadapan> diakses 2 November 2020

“KPK Tak Perlu Izin Penyadapan” dalam <https://nasional.kompas.com/read/2013/03/21/03190973/kpk.tak.perlu.izin.penyadapan.?page=all> diakses 30 Desember 2020

Putra, Harya, Dirga “Induksi dan Deduksi” dalam <https://dirgaharyaputra.wordpress.com/2015/03/08/induksi-dan-deduksi/> diakses 29 Agustus 2020

Susanti, Bivitri dalam <https://tirto.id/kontroversi-dewan-pengawas-kpk-bisa-jadi-alat-intervensi-presiden-eijy> diakses 18 Agustus 2020

“the American dream,” dalam <https://www.merriam-webster.com/dictionary/the%20American%20dream> diakses 20 Desember 2020

Transparency International
https://www.transparency.org/news/feature/asia_pacific_makes_little_to_no_progress_on_anti_corruption diakses 30 Oktober 2019

Vesa, Krishna, Muhammad dalam “Mengulas Naskah Akademik dan Latar Belakang Revisi UU KPK”
<https://www.kompasiana.com/m.krishna/5d80f2950d823020793527c2/mengulas-naskah-akademik-dan-latar-belakang-revisi-uu-kpk?page=all> diakses 29 Oktober 2019

Wijoso, Hrini, dalam “Advokat Tuntut Imunitas Dari Penyadapan”, terdapat dalam <https://anggara.org/2006/07/28/advokat-tuntut-imunitas-dari-penyadapan/> diakses 17 Agustus 2020

Wiranto, “Keterangan Kementerian Polhukam, Jakarta, Rabu, 18 September 2019”, dalam <https://tirto.id/kontroversi-dewan-pengawas-kpk-bisa-jadi-alat-intervensi-presiden-eijy> diakses 18 Agustus 2020